

PROFIL KEMISKINAN PROVINSI MALUKU UTARA 2023

Volume 11, 2024



PROFIL KEMISKINAN PROVINSI MALUKU UTARA 2023

Volume 11, 2024

<https://malut.bps.go.id>



PROFIL KEMISKINAN PROVINSI MALUKU UTARA 2023

Volume 11, 2024

Katalog: 3205005.82

ISSN: 2654-9670

Nomor Publikasi: 82000.24027

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: xii+54 Halaman

Penyusun Naskah:

BPS Provinsi Maluku Utara

Penyunting:

BPS Provinsi Maluku Utara

Pembuat Kover:

BPS Provinsi Maluku Utara

Penerbit:

©BPS Provinsi Maluku Utara

Sumber Ilustrasi:

canva.com

istockphoto.com

unsplash.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari BPS Provinsi Maluku Utara.

TIM PENYUSUN

Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2023

Volume 11, 2024

Pengarah:

Ir. Nurhidayat Maskat, M.Si.

Penanggung Jawab:

Hasnim Saadi, S.E.

Penyunting:

Emilia Fitri Siregar, S.Tr.Stat.

Mutia Elyani, S.Tr.Stat.

Penulis:

Mohammad Rifqi Khikmawan, S.Tr.Stat.

Ahmad Muchtarom, S.Tr.Stat.

Maulana Dawam Ihza Albana, S.Tr.Stat.

Pengolah Data:

Mohammad Rifqi Khikmawan, S.Tr.Stat.

Ahmad Muchtarom, S.Tr.Stat.

Farida Nasir, S.E.

Desain:

Ridwan Prayogi, S.Tr.Stat.

KATA PENGANTAR

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan terpercaya.

Publikasi “Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2023” menyajikan data dan informasi kemiskinan yang mencakup metodologi penghitungan tingkat kemiskinan yang digunakan oleh BPS. Selain itu, publikasi ini juga menyajikan analisis perkembangan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, distribusi dan ketimpangan pengeluaran, serta profil atau karakteristik rumah tangga miskin di Maluku Utara. Data kemiskinan yang disajikan dalam publikasi ini adalah hasil pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023.

Diharapkan publikasi ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian publikasi ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih. Saran dan kritik sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Ternate, Agustus 2024
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara



Nurhidayat Maskat

DAFTAR ISI
Profil Kemiskinan Maluku Utara 2023
 Volume 11, 2024

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Ruang Lingkup.....	3
1.3. Data yang Digunakan	4
BAB II KAJIAN LITERATUR.....	7
2.1. Definisi Kemiskinan	7
BAB III METODOLOGI.....	13
3.1. Penghitungan Kemiskinan.....	13
3.2. Indikator Kemiskinan	18
BAB IV ULASAN TINGKAT KEMISKINAN MALUKU UTARA.....	23
4.1. Garis Kemiskinan Provinsi MalukuUtara	23
4.2. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara	25
4.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan	26
4.4. Indeks Keparahan Kemiskinan	29
4.5. Distribusi dan Ketimpangan Pengeluaran.....	31
BAB V KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN DI MALUKU UTARA.....	37
5.1. Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)	38
5.2. Karakteristik Ketenagakerjaan	40
5.3. Karakteristik Pendidikan	42
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN TABEL-TABEL.....	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Perkembangan Garis Kemiskinan Maluku Utara (rupiah/kapita/bulan), 2019–2023.....	23
Gambar 4.2 Perkembangan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota (rupiah/kapita/bulan), 2021–2023 .	24
Gambar 4.3. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maluku Utara, 2019–2023	25
Gambar 4.4 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Maluku Utara menurut Kabupaten/Kota, 2021–2023	26
Gambar 4.5 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara, 2019–2023.....	27
Gambar 4.6 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, 2021–2023	28
Gambar 4.7 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Maluku Utara, 2019–2023.....	29
Gambar 4.8 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, 2021–2023	30
Gambar 4.9 Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Menurut Daerah di Provinsi Maluku Utara, 2019–2023.....	31
Gambar 4.10 Distribusi Pengeluaran Penduduk Maluku Utara, 2023	33
Gambar 5.1 Persentase Penduduk Miskin yang Menggunakan Air Layak di Maluku Utara, 2023.....	38
Gambar 5.2 Persentase Penduduk Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama di Maluku Utara, 2023.....	40
Gambar 5.3 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas di Maluku Utara Menurut Status Bekerja, 2023	41

Gambar 5.4	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas di Maluku Utara Menurut Sektor Bekerja, 2023	42
Gambar 5.5	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur di Maluku Utara, 2023.....	43
Gambar 5.6	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Maluku Utara, 2023.....	44

<https://malut.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah (rupiah/kapita/bulan), 2019–2023	49
Lampiran 2	Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah (rupiah/kapita/bulan), 2019–2023	49
Lampiran 3	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah (ribu jiwa), 2019–2023	50
Lampiran 4	Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah (persen), 2019–2023	50
Lampiran 5	Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2019–2023.....	51
Lampiran 6	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah (persen), 2019–2023	51
Lampiran 7	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2019–2023.....	52
Lampiran 8	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah (persen), 2019–2023	52
Lampiran 9	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2019–2023.....	53
Lampiran 10	<i>Gini Ratio</i> di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, 2019–2023.....	53
Lampiran 11	Distribusi Pengeluaran Penduduk Maluku Utara Menurut Daerah (persen), 2019–2023	54

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat waktu.

<https://malut.bps.go.id>

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di daerah manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat waktu. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) sudah melakukan penghitungan jumlah penduduk miskin secara periodik setiap tiga tahun sejak tahun 1984, sedangkan penyajian sampai level provinsi baru dimulai pada tahun 1990. Sejak tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun sampai level provinsi. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Modul Konsumsi setiap bulan Maret. Pada tahun 2011, Susenas dilaksanakan secara triwulanan untuk mengestimasi data kemiskinan level kabupaten/kota, meskipun untuk karakteristik rumah tangga miskin hanya dapat disajikan pada tingkat provinsi. Kemudian, mulai tahun 2015, Susenas dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu Bulan Maret untuk level estimasi data kemiskinan kabupaten/kota dan September untuk level estimasi data kemiskinan provinsi.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup analisis mencakup tingkat kemiskinan pada Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota pada tahun 2023. Analisis ini juga

menyajikan karakteristik rumah tangga miskin, distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk, serta beberapa indikator kemiskinan lainnya.

1.3. Data yang Digunakan

Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 yang terdiri dari 5.570 rumah tangga sampel di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Data tersebut dipergunakan untuk estimasi kemiskinan menurut kabupaten/kota serta analisis karakteristik rumah tangga miskin untuk tingkat provinsi.

<https://malut.bps.go.id>

BAB II

KAJIAN LITERATUR

Tatkala negara atau daerah menjadi lebih kaya (sejahtera), negara atau daerah tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi.

<https://intitut.bps.go.id>

BAB II KAJIAN LITERATUR

2.1. Definisi Kemiskinan

2.1.1. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu daerah pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”.

Ketika negara atau daerah menjadi lebih kaya (sejahtera), negara atau daerah tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi. Misalnya, Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin sebagai mereka yang mempunyai pendapatan per kapita di bawah 50 persen dari median (rata-rata) pendapatan. Ketika median/rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat.

Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan daerah secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar daerah dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

2.1.2. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum ini diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan absolut “tetap (tidak berubah)” dalam hal standar hidup. Garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Di Amerika Serikat, garis kemiskinan tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga angka kemiskinan sekarang memungkinkan untuk dibandingkan dengan angka kemiskinan satu dekade yang lalu, dengan catatan bahwa definisi kemiskinan tidak berubah.

Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan pengentasan kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). Angka kemiskinan akan terbanding antara satu daerah dengan daerah lain hanya jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua daerah tersebut. Bank Dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam penentuan arah penyaluran sumber daya finansial (dana) yang ada dan juga dalam analisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan.

Pada umumnya, ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu: a) US \$ 1 PPP per kapita per hari, di mana diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup di bawah ukuran tersebut; b) US \$ 2 PPP per kapita per hari, di mana lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. US \$ yang digunakan adalah US \$ PPP

(*Purchasing Power Parity*), bukan nilai tukar resmi (*exchange rate*). Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.

2.1.3. Terminologi Kemiskinan Lainnya

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural. Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan Struktural: Masalah dan Kebijakan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995) mendefinisikan “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan”. Dikatakan tidak menguntungkan karena tatanan itu tidak hanya memunculkan, tetapi (lebih lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat.

Di dalam kondisi struktur yang demikian itu, kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tidak adil. Tatanan yang tidak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tidak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Misalnya, penduduk yang tinggal di pulau-pulau terluar atau mendekati pulau terluar.

BAB III

METODOLOGI

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).

<https://malut.bps.go.id>

BAB III METODOLOGI

3.1. Penghitungan Kemiskinan

3.1.1. Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

3.1.2. Sumber Data

Sumber data utama yang dipakai adalah data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Maret 2023 yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2023.

3.1.3. Metode

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sehingga: $GK = GKM + GKNM$.

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing - masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari.

Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi- padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

3.1.4. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi, yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara yaitu Garis Kemiskinan periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah:

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

di mana:

GKM_{jp} = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori) provinsi p.

P_{jkp} = Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p.

Q_{jkp} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.

V_{jkp} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p.

j = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

p = Provinsi ke-p.

Selanjutnya, GKMj tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$HK_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

di mana:

K_{jkp} = kalori dari komoditi k di daerah j provinsi p.

HK_{jp} = harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p.

$$GKM_{jp} = HK_{jp} \times 2.100$$

di mana:

GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kilokalori/kapita/hari atau Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

j = Daerah (perkotaan/perdesan)

p = Provinsi p

Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai

kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

di mana:

$GKNM_{jp}$ = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.

V_{kjp} = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p (dari Susenas modul konsumsi).

r_{kj} = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j (kota+desa).

k = Jenis komoditi non-makanan terpilih. J = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

p = Provinsi (perkotaan atau perdesaan).

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per

bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu kabupaten/kota dihitung dengan:

$$\%PM_k = \frac{PM_k}{P_k}$$

di mana:

$\%PM_k$ = % Penduduk miskin di kabupaten/kota k.

PM_k = Jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota k.

P_k = Jumlah penduduk di kabupaten/kota k.

Sementara itu, penduduk miskin untuk level provinsi merupakan jumlah dari penduduk miskin kabupaten/kota atau:

$$PM_p = \sum_{k=1}^n PM_k$$

di mana:

PM_p = Penduduk miskin provinsi.

PM_k = Penduduk miskin kabupaten/kota k.

n = Jumlah kabupaten/kota.

Persentase penduduk miskin provinsi adalah:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

di mana:

$\%PM_p$ = Persentase penduduk miskin provinsi.

PM_p = Jumlah penduduk miskin provinsi.

P_p = Jumlah penduduk provinsi

3.2. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- Pertama, *Head Count Index* (HCI = P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* = P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

di mana:

α = 0, 1, 2

Jika $\alpha=0$, diperoleh *Head Count Index* (P0), jika $\alpha=1$ diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P1), jika $\alpha=2$ disebut Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity* P2)

z = Garis Kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dari penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

BAB IV

ULASAN

TINGKAT KEMISKINAN

MALUKU UTARA

Persentase penduduk miskin di Maluku Utara pada Maret 2023 sebesar 6,46 persen, naik 0,09 persen poin terhadap September 2022 dan naik 0,23 persen poin terhadap Maret 2022.

BAB IV ULASAN TINGKAT KEMISKINAN MALUKU UTARA

4.1. Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara

Selama lima tahun terakhir, garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan, baik pada daerah perkotaan maupun perdesaan, tersaji pada Gambar 4.1. Hal ini salah satunya disebabkan oleh inflasi yang menyebabkan kenaikan harga komoditi pembentuk garis kemiskinan yang meliputi komoditi makanan dan komoditi non makanan.

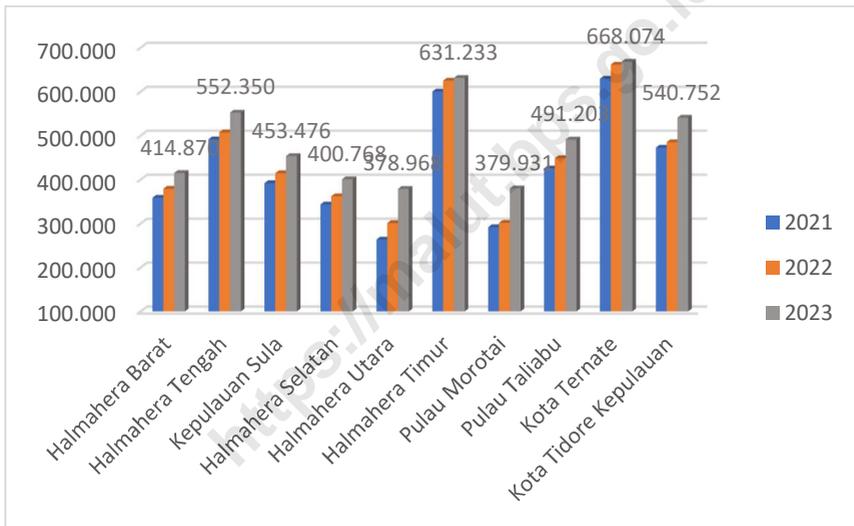


Gambar 4.1 Perkembangan Garis Kemiskinan Maluku Utara (rupiah/kapita/bulan), 2019–2023

Garis kemiskinan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2023 sebesar Rp564.733,-/kapita/bulan naik sebesar 9,79 persen dari tahun 2022. Pada daerah perkotaan garis kemiskinan tahun 2023 sebesar Rp599.137,-/kapita/bulan naik sebesar 10,55 persen dari tahun 2022. Sedangkan pada daerah perdesaan, garis kemiskinan tahun 2023 sebesar

Rp550.988,-/kapita/bulan naik sebesar 9,46 persen dari tahun 2022. Selengkapnya tersaji dalam Lampiran 1.

Garis kemiskinan di daerah perdesaan lebih rendah daripada daerah perkotaan karena komoditi untuk penghitungan garis kemiskinan di daerah perdesaan lebih sedikit daripada daerah perkotaan. Selain itu, harga komoditi makanan di daerah perdesaan pada umumnya lebih murah dibandingkan di daerah perkotaan.



Gambar 4.2 Perkembangan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota (rupiah/kapita/bulan), 2021–2023

Seperti terlihat dalam Gambar 4.2, garis kemiskinan di Kota Ternate merupakan yang tertinggi di Maluku Utara, yaitu sebesar Rp668.074,-/kapita/bulan sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp378.968,-/kapita/bulan. Perbedaan garis kemiskinan tersebut disebabkan oleh perbedaan harga komoditi dalam penghitungan garis kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota, baik komoditi makanan maupun non

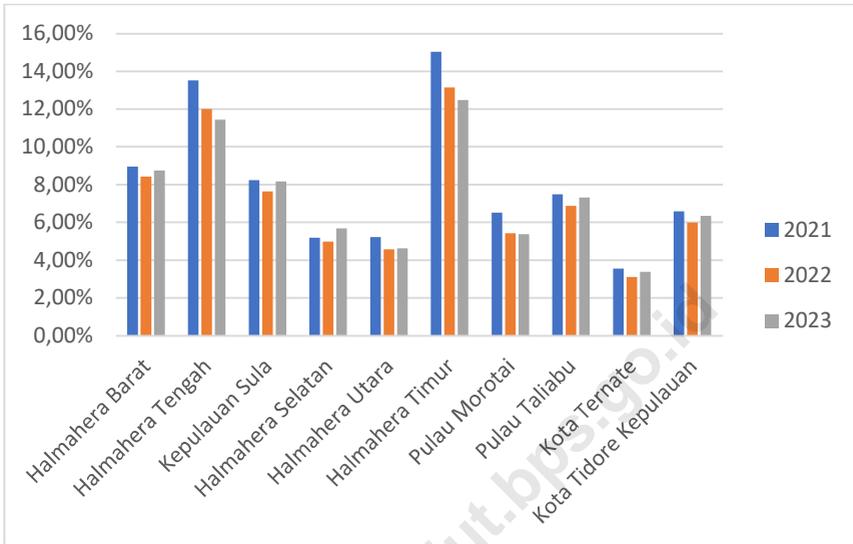
makanan.

4.2. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara

Secara umum, pada periode 2019-2023, tingkat kemiskinan di Maluku Utara cenderung fluktuatif. Sejak tahun 2019 hingga 2023, baik pada jumlah maupun persentase penduduk miskin menunjukkan pola semakin meningkat. Jumlah penduduk miskin di Maluku Utara tahun 2023 mencapai 83,80 ribu orang, naik sebanyak 3,92 ribu orang dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin sebesar 6,46 persen, naik 0,23 persen poin terhadap 2022. Perkembangan jumlah penduduk miskin tahun 2019 sampai dengan 2023 disajikan pada Lampiran 2.



Gambar 4.3 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maluku Utara, 2019–2023



Gambar 4.4 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Maluku Utara menurut Kabupaten/Kota, 2021–2023

Dapat dilihat pada Gambar 4.4, pada tahun 2023 persentase penduduk miskin di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara mengalami fluktuatif jika dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan tertinggi di Kabupaten Halmahera Timur yaitu sebesar 12,47 persen dan Kabupaten Halmahera Tengah yaitu sebesar 11,44 persen. Sementara itu Kota Ternate memiliki persentase penduduk miskin terendah yaitu hanya sebesar 3,39 persen pada tahun 2023. Kemudian tingkat kemiskinan terendah berikutnya yaitu Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 5,68 persen dan Kabupaten Halmahera Utara sebesar 4,62 persen.

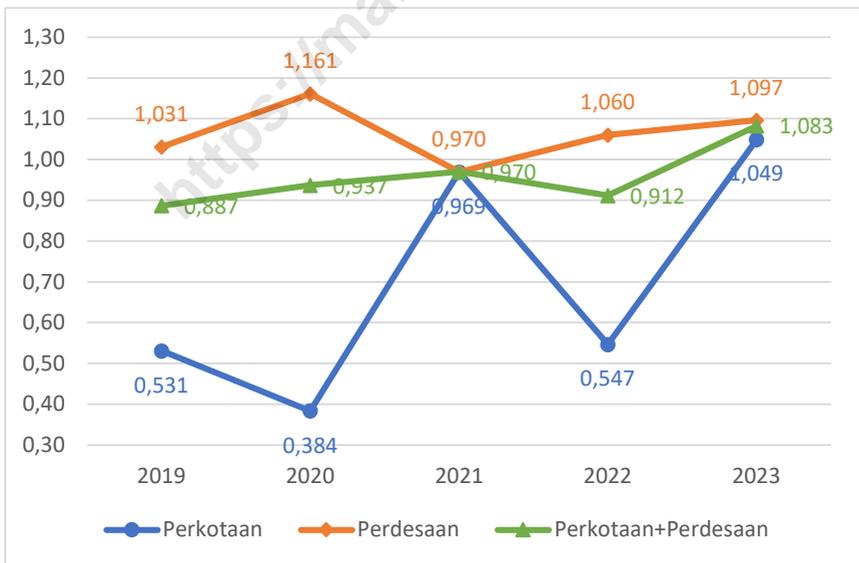
4.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index = P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai

indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

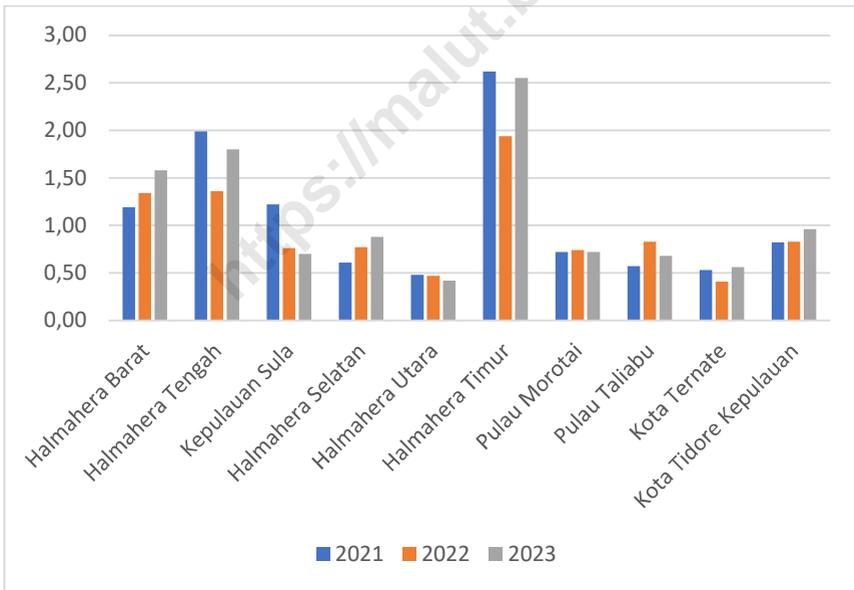
Indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir bergerak fluktuatif. Pada tahun 2023 indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Maluku Utara naik menjadi 1,083 dibanding tahun 2022 yang sebesar 0,912. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Maluku Utara semakin menjauhi garis kemiskinan.

Jika dibandingkan antara perkotaan dan perdesaan, indeks kedalaman kemiskinan di daerah perdesaan sedikit lebih tinggi dibanding perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di perdesaan sedikit lebih dalam dibanding di daerah perkotaan. Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.



Gambar 4.5 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara, 2019–2023

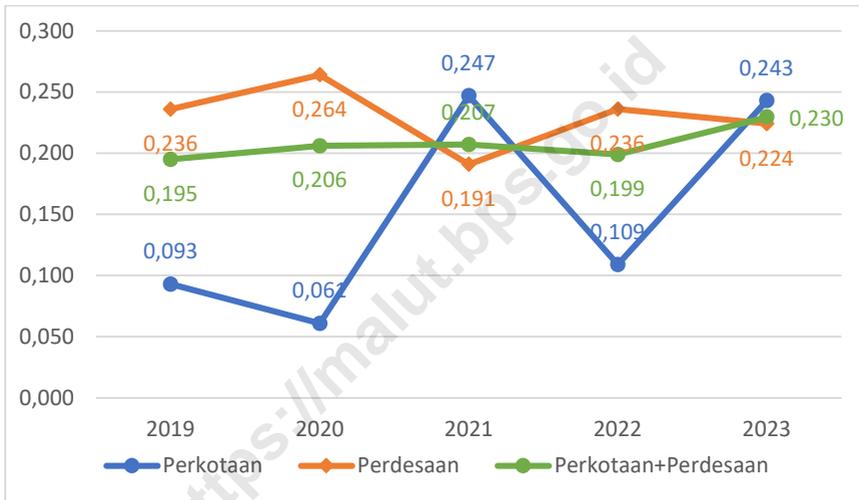
Sementara itu pada Gambar 4.6 di bawah dapat dilihat perkembangan indeks kedalaman kemiskinan menurut kabupaten/kota. Pada tahun 2023, kabupaten yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Halmahera Timur yaitu sebesar 2,55 sedangkan indeks kedalaman kemiskinan terendah berada di Kabupaten Halmahera Utara, yaitu sebesar 0,42. Hal ini mengindikasikan bahwa sedikit lebih sulit untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur daripada di Kabupaten Halmahera Utara karena secara umum penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Timur memiliki jarak yang cukup jauh di bawah garis kemiskinan.



Gambar 4.6 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2021–2023

4.4. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index = P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

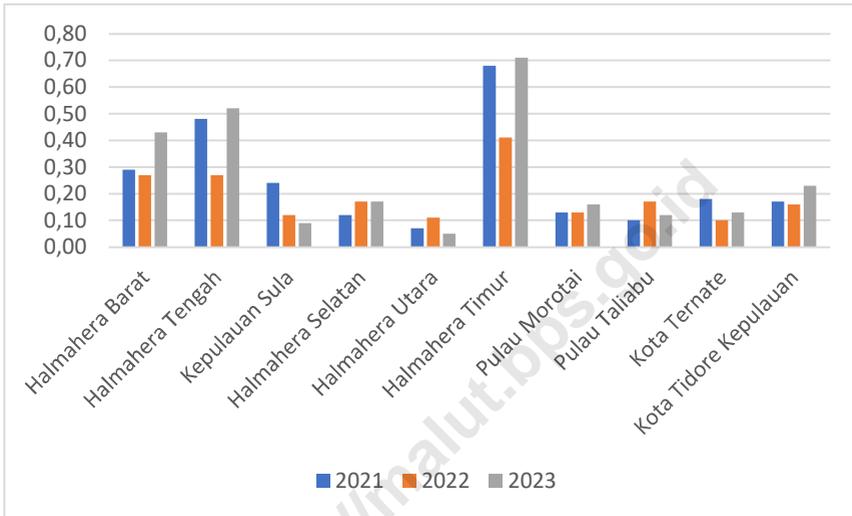


Gambar 4.7 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Maluku Utara, 2019–2023

Pada Gambar 4.7 dapat diketahui bahwa dalam lima tahun terakhir, indeks keparahan kemiskinan Provinsi Maluku Utara cenderung bergerak fluktuatif. Pada tahun 2023, indeks keparahan kemiskinan Provinsi Maluku Utara meningkat sebesar 0,031 menjadi 0,230 dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,199. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cenderung semakin tinggi.

Jika dibandingkan antara perkotaan dan perdesaan, indeks keparahan kemiskinan di daerah perkotaan pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Hal ini menunjukkan ketimpangan

pengeluaran antar penduduk di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi daripada perdesaan. Selengkapnya disajikan pada Lampiran 8.



Gambar 4.8 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2021–2023

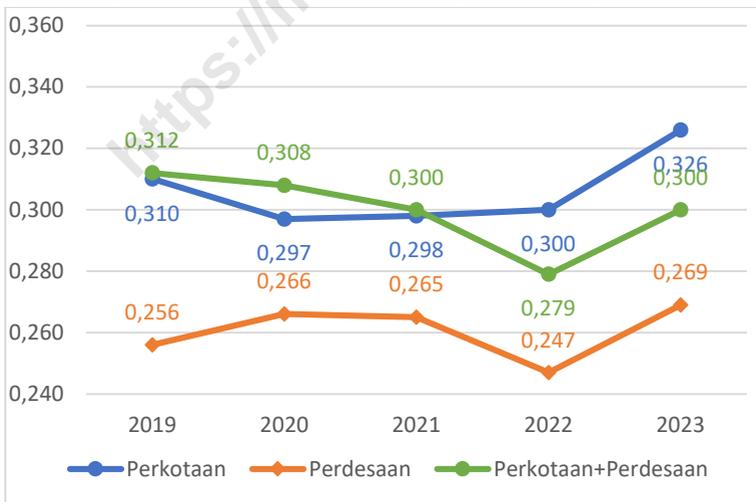
Pada tingkat kabupaten/kota, indeks keparahan kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota cenderung bervariasi. Sebagian besar kabupaten mengalami kenaikan sementara beberapa kabupaten lainnya mengalami penurunan.

Pada gambar 4.8 dapat dilihat bahwa kabupaten yang memiliki indeks keparahan kemiskinan yang tertinggi adalah Halmahera Timur yaitu sebesar 0,71 sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Halmahera Utara, yaitu sebesar 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur lebih besar daripada di Kabupaten Halmahera Utara karena distribusi pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Timur lebih beragam.

4.5. Distribusi dan Ketimpangan Pengeluaran

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah *Gini Ratio*. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. *Gini Ratio* di Provinsi Maluku Utara berfluktuasi dari waktu ke waktu, namun masih dibawah 0,400 yang termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. *Gini Ratio* pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,300 naik 0,021 poin dibandingkan dengan *Gini Ratio* tahun 2022 yang sebesar 0,279.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode 2022–2023 *Gini Ratio* di daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,026 poin yaitu dari 0,300 pada tahun 2022 menjadi 0,326 pada tahun 2023. Sama seperti di daerah perkotaan, di daerah perdesaan nilai *Gini Ratio* mengalami peningkatan juga sebesar 0,022 yaitu dari 0,247 pada tahun 2022 menjadi 0,269 pada tahun 2023. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Maluku Utara dapat dilihat pada Gambar 4.9.



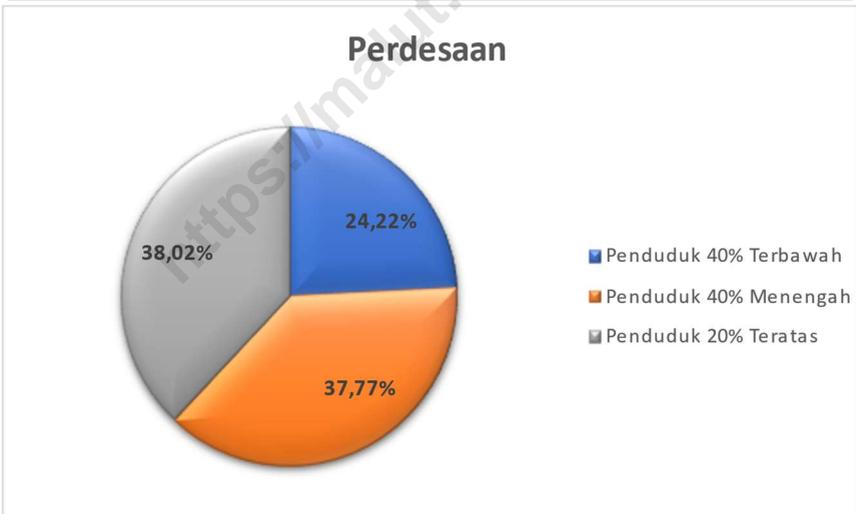
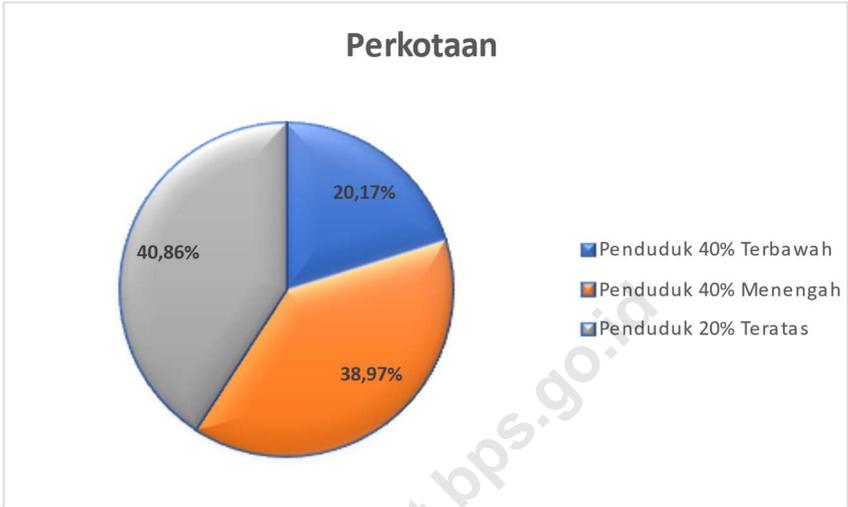
Gambar 4.9 Perkembangan *Gini Ratio* Menurut Daerah di Provinsi Maluku Utara, 2019–2023

Selain *Gini Ratio*, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan

adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia (*World Bank*). Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

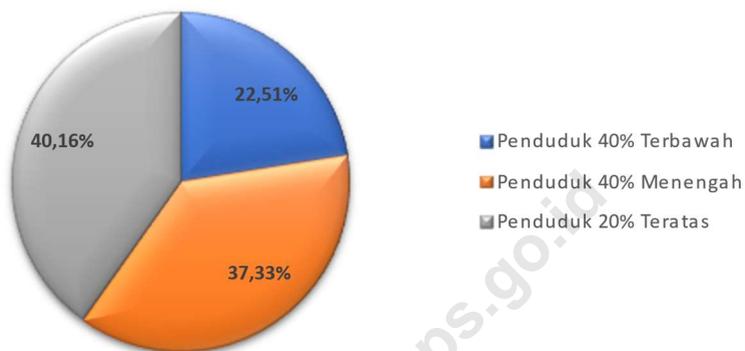
Pada tahun 2023, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 22,51 persen yang termasuk pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada tahun 2023 ini turun jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 yang sebesar 23,04 persen. Selengkapnya disajikan pada Lampiran 11.

Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari *Gini Ratio*, ukuran ketimpangan Bank Dunia pun mencatat hal yang sama yaitu pola pengeluaran penduduk di daerah perkotaan lebih timpang dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada tahun 2023 adalah sebesar 20,17 persen, sedangkan di daerah perdesaan yaitu sebesar 24,22 persen. Tingkat ketimpangan dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia (*World Bank*) dapat dilihat pada Gambar 4.10.



Gambar 4.10 Distribusi Pengeluaran Penduduk Maluku Utara, 2023

Perkotaan + Perdesaan



Lanjutan Gambar 4.10

BAB V

KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN MALUKU UTARA

Pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik sosial dan dimensi ekonomi penduduk miskin diharapkan mampu membantu perencanaan, pengawasan, dan evaluasi dari program penanggulangan kemiskinan yang efektif dan efisien.

BAB V KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN DI MALUKU UTARA

Pengukuran kemiskinan yang akurat dan terpercaya merupakan alat penting bagi pembuat kebijakan untuk memfokuskan perhatian pada kondisi kehidupan masyarakat miskin. Data kemiskinan yang baik tidak hanya memungkinkan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani kemiskinan, tetapi juga memfasilitasi perbandingan kemiskinan antara waktu dan wilayah serta penentuan target yang tepat untuk meningkatkan kondisi hidup masyarakat miskin.

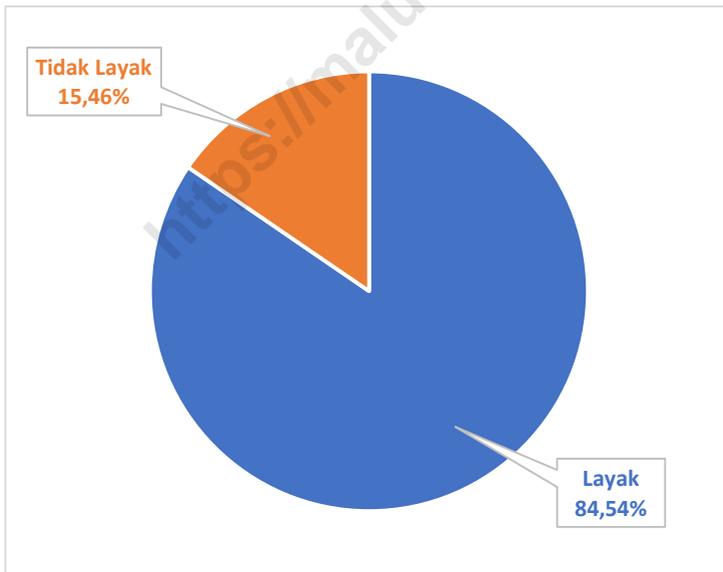
Selain data makro yang valid, profil kemiskinan yang mendalam juga sangat penting agar kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Profil ini menyediakan informasi mengenai kebutuhan dan keadaan spesifik dari masyarakat miskin, sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan masalah yang dihadapi secara langsung. Pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik rumah tangga miskin membantu dalam mengidentifikasi akar penyebab kemiskinan yang berkelanjutan, memungkinkan upaya yang lebih terarah dan efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Akhirnya, pengetahuan yang menyeluruh mengenai dimensi sosial dan ekonomi dari penduduk miskin mendukung perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan. Dengan informasi yang tepat, program-program tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan memberikan dampak positif yang signifikan, berkontribusi pada pengurangan kemiskinan secara keseluruhan.

5.1. Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)

5.1.1. Air Layak

Air yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manumur, terutama untuk aktivitas minum dan memasak di setiap rumah tangga. Ketersediaan air layak mendukung keberlangsungan hidup dengan memastikan bahwa rumah tangga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan sehat. Dalam konteks publikasi ini, air layak didefinisikan sebagai air yang berasal dari sumber yang terlindung, termasuk air hujan atau sumber yang terlindung lainnya, dengan syarat bahwa air untuk keperluan mandi, mencuci, dan kegiatan lain juga harus berasal dari sumber yang terlindung.



Gambar 5.1 Persentase Penduduk Miskin yang Menggunakan Air Layak di Maluku Utara, 2023

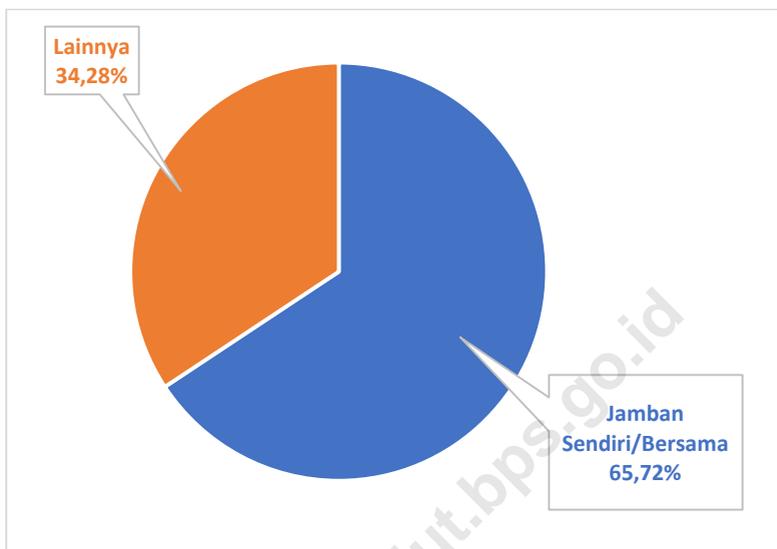
Dari Gambar 5.1 terlihat pada tahun 2023, sebanyak 84,54 persen penduduk miskin di Maluku Utara telah menggunakan air layak. Namun, masih terdapat 15,46 persen penduduk miskin yang belum memiliki akses ke air layak, hal ini menandakan adanya tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan semua rumah tangga dapat menikmati manfaat dari air layak.

5.1.2. Jamban Sendiri/Bersama

Jamban merupakan salah satu sarana perumahan yang sedianya harus dimiliki oleh seluruh rumah tangga. Penggunaan jamban yang baik sangat berperan dalam meningkatkan kesehatan seluruh anggota keluarga. Sebaliknya, penggunaan jamban yang tidak memenuhi standar kesehatan dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan.

Di masyarakat, penggunaan jamban dapat dibagi menjadi beberapa kategori: jamban milik sendiri, jamban bersama yang digunakan terbatas oleh dua hingga empat rumah tangga, jamban umum yang dapat diakses oleh masyarakat luas, dan tidak memiliki jamban sama sekali.

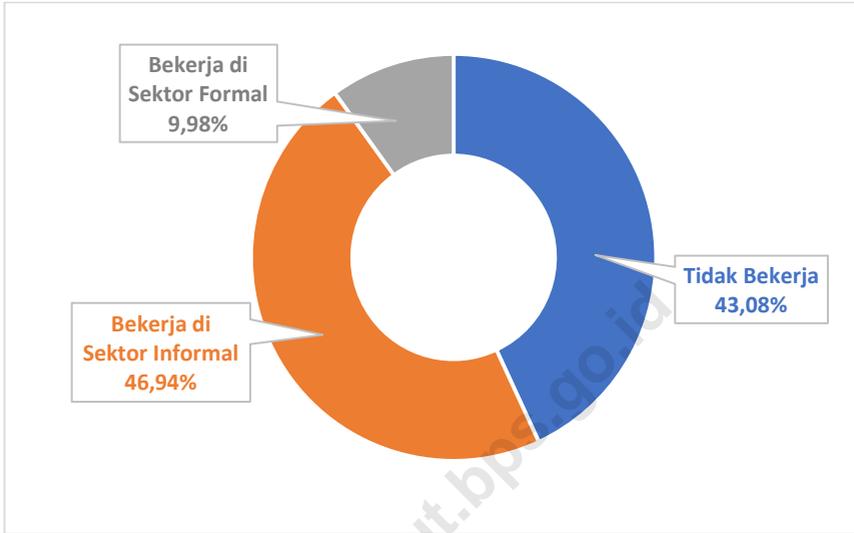
Pada tahun 2023, di Maluku Utara, tercatat 65,72 persen penduduk miskin memiliki jamban sendiri atau jamban bersama. Sementara itu, 34,28 persen penduduk masih menggunakan jamban yang tidak memadai baik jamban umum maupun tidak memiliki jamban sama sekali.



Gambar 5.2 Persentase Penduduk Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama di Maluku Utara, 2023

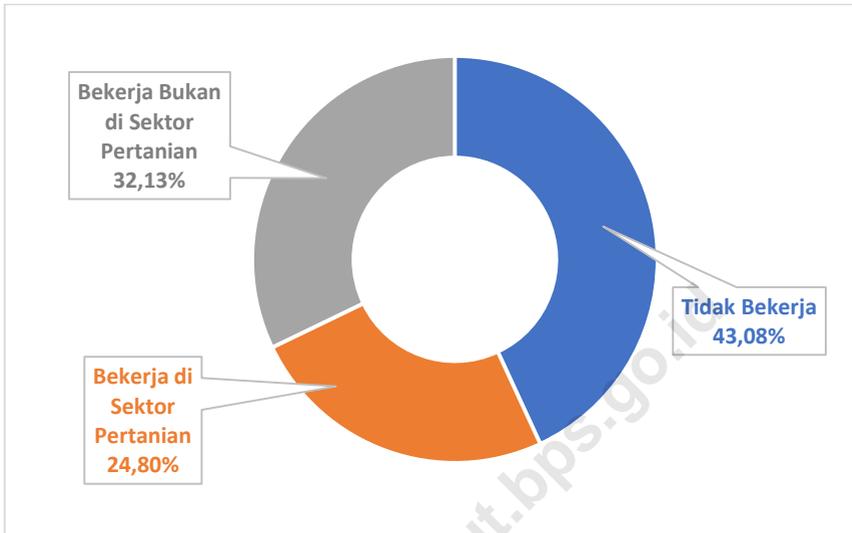
5.2. Karakteristik Ketenagakerjaan

Status bekerja merupakan salah satu indikator kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Salah satu karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menunjukkan perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah jenis lapangan usaha atau sektor yang menjadi sumber penghasilan utama rumah tangga. Profil kemiskinan seringkali melekat pada mereka yang tidak bekerja atau bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan, serta pencari kayu dan madu di hutan. Selain itu, penduduk miskin juga cenderung memiliki status pekerjaan informal, seperti berusaha sendiri, berusaha dengan bantuan buruh tidak dibayar/keluarga, atau pekerja lepas.



Gambar 5.3 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas di Maluku Utara Menurut Status Bekerja, 2023

Pada Gambar 5.3 terlihat bahwa sebanyak 43,08 persen penduduk miskin umur 15 Tahun ke atas di Maluku Utara tidak bekerja. Angka tersebut termasuk penduduk yang berstatus pengangguran dan bukan Angkatan kerja. Sementara itu sebesar 46,94 persen penduduk miskin di Maluku Utara bekerja pada sektor informal. Kemudian sebesar 9,98 persen penduduk miskin Maluku Utara bekerja pada sektor formal.

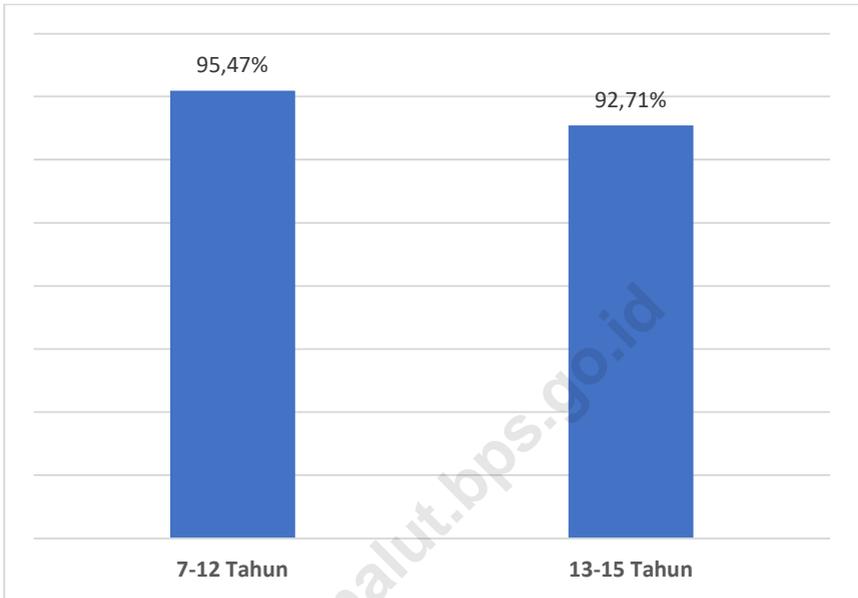


Gambar 5.4 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas di Maluku Utara Menurut Sektor Bekerja, 2023

Kemudian berdasarkan Gambar 5.4, dari 56,92 persen penduduk miskin umur 15 tahun ke atas di Maluku Utara yang bekerja, 24,80 persennya bekerja di sektor pertanian. Sementara itu penduduk miskin yang bekerja bukan di sektor pertanian sebesar 32,13 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk miskin di Maluku Utara mayoritas tidak bekerja dan ternyata lebih banyak penduduk miskin yang bekerja diluar sektor pertanian dibanding di sektor pertanian.

5.3. Karakteristik Pendidikan

Hubungan antara kemiskinan dan pendidikan sangat erat. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki risiko yang lebih rendah untuk terjebak dalam kemiskinan. Karakteristik pendidikan yang diuraikan disini adalah angka partisipasi sekolah menurut golongan umur.

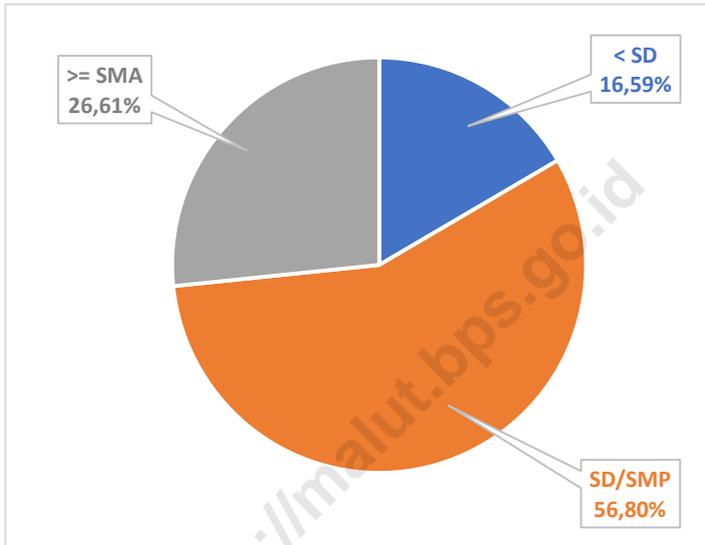


Gambar 5.5 Persentase Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur di Maluku Utara, 2023

Angka partisipasi sekolah adalah proporsi dari penduduk yang masih bersekolah. Publikasi ini menyajikan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Informasi ini berguna untuk memantau pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun, khususnya di kalangan penduduk miskin yang berada dalam umur sekolah.

Dari Gambar 5.5 dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 angka partisipasi sekolah penduduk miskin untuk kelompok umur 7-12 tahun adalah 95,47 persen, artinya ada sebanyak 95,47 persen penduduk miskin dalam kelompok umur ini yang sedang menempuh pendidikan/bersekolah. Sementara itu pada kelompok umur 13-15 tahun angkanya lebih rendah yaitu sebesar 92,71 persen yang artinya ada 92,71 persen penduduk miskin umur 13-15 tahun yang sedang bersekolah. Jika

mengacu pada program wajib belajar 9 tahun, seharusnya angka partisipasi sekolah untuk kedua kelompok umur tersebut mencapai 100 persen.



Gambar 5.6 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Maluku Utara 2023

Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, pendidikan tertinggi yang paling banyak ditamatkan penduduk miskin adalah pendidikan dasar (SD atau SMP), yaitu sebesar 56,80 persen. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SLTA ke atas yang ditamatkan hanya sebesar 26,61 persen. Selain itu masih ada sebesar 16,59 persen penduduk miskin yang tidak menamatkan SD atau bahkan tidak pernah bersekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga miskin memiliki karakteristik pendidikan yang kurang baik atau rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik dan World Bank Institute. 2002. *Dasar-dasar Analisis Kemiskinan*. BPS: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2024. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2023*. BPS: Jakarta

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. 2024. *Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2022*. BPS Provinsi Maluku Utara: Ternate.

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. 2024. *Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No. 34/07/82/Th. XXIII*. BPS Provinsi Maluku Utara: Ternate.

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. 2024. *Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No. 35/07/82/Th. XXIII*. BPS Provinsi Maluku Utara: Ternate.

LAMPIRAN TABEL-TABEL

<https://malut.bps.go.id>

LAMPIRAN TABEL-TABEL

Lampiran 1 Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah (rupiah/kapita/bulan), 2019–2023

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
2019	474.475	432.815	444.650
2020	488.764	452.080	462.639
2021	516.450	478.452	489.375
2022	541.972	503.388	514.383
2023	599.137	550.988	564.733

Lampiran 2 Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota (rupiah/kapita/bulan), 2021–2023

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
Halmahera Barat	358.707	379.108	414.870
Halmahera Tengah	491.657	507.555	552.350
Kepulauan Sula	391.912	414.512	453.476
Halmahera Selatan	343.323	362.100	400.768
Halmahera Utara	263.507	301.041	378.968
Halmahera Timur	600.339	624.983	631.233
Pulau Morotai	291.879	301.712	379.931
Pulau Taliabu	425.241	448.735	491.203
Kota Ternate	629.463	661.459	668.074
Kota Tidore Kepulauan	472.651	484.983	540.752

Lampiran 3 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara
Menurut Daerah (ribu jiwa), 2019–2023

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
2019	15,32	69,28	84,60
2020	16,58	69,79	86,37
2021	18,54	68,62	87,16
2022	19,09	60,79	79,87
2023	23,40	60,39	83,80

Lampiran 4 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara
Menurut Daerah (persen), 2019–2023

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
2019	4,27	7,78	6,77
2020	4,53	7,70	6,78
2021	5,13	7,59	6,89
2022	5,18	6,66	6,23
2023	6,23	6,55	6,46

Lampiran 5 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara
Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2023

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
Halmahera Barat	8,95	8,43	8,74
Halmahera Tengah	13,52	12,00	11,44
Kepulauan Sula	8,23	7,64	8,17
Halmahera Selatan	5,19	4,99	5,68
Halmahera Utara	5,22	4,58	4,62
Halmahera Timur	15,04	13,14	12,47
Pulau Morotai	6,52	5,42	5,38
Pulau Taliabu	7,49	6,88	7,31
Kota Ternate	3,55	3,11	3,39
Kota Tidore Kepulauan	6,58	5,99	6,35

Lampiran 6 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Provinsi Maluku
Utara Menurut Daerah (persen), 2019–2023

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
2019	0,531	1,031	0,887
2020	0,384	1,161	0,937
2021	0,969	0,970	0,970
2022	0,547	1,060	0,912
2023	1,049	1,097	1,083

Lampiran 7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2023

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
Halimahera Barat	1,19	1,34	1,58
Halimahera Tengah	1,99	1,36	1,80
Kepulauan Sula	1,22	0,76	0,70
Halimahera Selatan	0,61	0,77	0,88
Halimahera Utara	0,48	0,47	0,42
Halimahera Timur	2,62	1,94	2,55
Pulau Morotai	0,72	0,74	0,72
Pulau Taliabu	0,57	0,83	0,68
Kota Ternate	0,53	0,41	0,56
Kota Tidore Kepulauan	0,82	0,83	0,96

Lampiran 8 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah (persen), 2019–2023

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
2019	0,093	0,236	0,195
2020	0,061	0,264	0,206
2021	0,247	0,191	0,207
2022	0,109	0,236	0,199
2023	0,243	0,224	0,230

Lampiran 9 Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021–2023

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
Halmahera Barat	0,29	0,27	0,43
Halmahera Tengah	0,48	0,27	0,52
Kepulauan Sula	0,24	0,12	0,09
Halmahera Selatan	0,12	0,17	0,17
Halmahera Utara	0,07	0,11	0,05
Halmahera Timur	0,68	0,41	0,71
Pulau Morotai	0,13	0,13	0,16
Pulau Taliabu	0,10	0,17	0,12
Kota Ternate	0,18	0,10	0,13
Kota Tidore Kepulauan	0,17	0,16	0,23

Lampiran 10 *Gini Ratio* di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, 2019–2023

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
2019	0,310	0,256	0,312
2020	0,297	0,266	0,308
2021	0,298	0,265	0,300
2022	0,300	0,247	0,279
2023	0,326	0,269	0,300

Lampiran 11 Distribusi Pengeluaran Penduduk Maluku Utara
Menurut Daerah (persen), 2023

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
Penduduk 40 persen Terbawah	20,17	24,22	22,51
Penduduk 40 persen Menengah	38,97	37,77	37,33
Penduduk 20 persen Teratas	40,86	38,02	40,16

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://malut.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jalan Stadion No. 65 Ternate, Maluku Utara, 97712
Telp (0921) 3127878, Homepage: <http://malut.bps.go.id>
E-mail: bps8200@bps.go.id

ISSN 2654-9670



9 772654 967008

